

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- A.G. Karatasapoetra dan A. Setiady. 1985. *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- A. Yovita Mangesti dan Bernard L. Tanya. 2014. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Bernard L. Tanya dan Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. 2019. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Boedi Harsono. 1999. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, Edisi Revisi.
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Fokky Fuad. 2016. *Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Agraria di Indonesia*. Jakarta: Indonesia European University.
- Gustav Radbruch. 1950. *Legal Philosophy, The Legal Philosophies Of Lask, Radbruch and Dabin* Cambridge. Mass: Harvard University Press.
- Hyronimus Rhiti. 2011. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Imam Sudiyat. 2000. *Hukum Adat Sketsa Azas*. Yogyakarta: Liberty.
- Johnny Ibrahim. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Baymedia Publishing.

- Lawrence M. Friedman. 2019. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Cet. II. (Terjemahan M. Khozim). Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Maria S.W. Soemardjono. 2008. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas.
- Mastang Ambo Baba. 2017. *Analisis Data Kualitatif*. Makassar: Aksara Timur.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- O. Notohamidjojo. 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: kencana.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rusmadi Murad. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Hak Atas Tanah*. Bandung: Alumni.
- Sarkawi. 2014. *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

\_\_\_\_\_. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

\_\_\_\_\_ dan Sri Mamuji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo persada.

Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Susilo Rahardjo dan Gudnanto. 2011. *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*. Kudus: Nora MediEnterprise.

Urip Santoso. 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

## **2. Disertasi**

Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Disertasi S2, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Soetiono. 2004. *Rule of Law* Disertasi S2, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

## **3. Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya**

Damianus Krismantoro. 2022. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia Dalam Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat*. Yogyakarta: International Journal of Demos Volume 4. No. 2.

Darwin Ginting. 2012. *Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No. 1.

Desi Apriani dan Arifin Bur. 2021. *Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Volume 5. Nomor 2.

- Hari Agus Santoso. 2021. *Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU "PTB"*. Jatiswara. Volume 36. No. 3.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 2023. *Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 3/Juknis -HK.02/III/2023*.
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Semarang: Jurnal Crepido. Volume 01. No. 01.
- Marta Cristina Hartana. 2019. *Persengketaan-Persengketaan Tanah di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Volume 7 No. 3.
- Ni Putu Diah Anjeni Werdhi Wahari dan I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari. 2022. *Pengaturan Girik dan Implikasi Kepastian Hukum dalam Pembuktian Hak Atas Tanah*. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 19. No. 3.
- Nyoman Gede Remaja. 2014. *Makna Hukum dan Kepastian Hukum*. Kertha Widya. Jurnal Hukum. Vol. 2. No. 1.
- Sahrina Safiudin. 2018. *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Jurnal Mimbar Hukum Volume 30. No. 1.
- Setiyo Utomo. 2023. *Problematika Tumpang Tindih Status Kepemilikan Tanah*. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 6 No. 2.
- Suardita, I Ketut. *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*. Sistem Informasi Manajemen Dosen, Bali: Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2023. <https://kbbi.web.id/perlindungan>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2023. <https://kbbi.web.id/hukum>.

#### **4. Peraturan Perundang-Undangan**

Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Negara Agraria No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

## 5. Sumber Internet

Meiryani. 2021. Memahami Perbedaan Analisis Kualitatif dan Analisis Kuantitatif dalam Penelitian Ilmiah, 2021, <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-perbedaan-analisis-kualitatif-dan-analisis-kuantitatif-dalam-penelitian-ilmiah/>.

Zuraya. Nidia. 2023. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rnni8d383/apindo-jumlah-penduduk-indonesia-yang-besar-topang-ekonomi-2023>.

Fadhilah, Iman. 2022. <https://www.kompas.com/global/read/2022/11/01/170000370/berapa-luas-negara-indonesia-?page=all>.

Smartlitbang. 2023. <https://elitbang.depok.go.id/User/DetailKnowledge/penelitian-definisi-ciri-sikap-jenis-dan>

